



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIDIYASTUTI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **154093**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/250 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.250.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.750.000
2. MOBIL, TOYOTA CORONA SEDAN Tahun 1994, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. LAINNYA, --- (SEPEDA) --- Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 441.200.000

III. HUTANG Rp. 125.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 316.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.